



► MASALAH PERKOTAAN

## Repotnya Jalan Kaki di Trotoar Jogja

Jalan kaki di beberapa trotoar Kota Jogja sangat susah. Ini menjadi salah satu permasalahan yang timbul akibat kemacetan dan buruknya tata kota. Berikut laporan wartawan Harian Jogja I Ketut Sawitra Mustika.

Sabtu (30/9) sore, lalu lintas di Jalan Dr. Sutomo Kota Jogja agak tersendat. Kendaraan mengular mengantre lampu merah berganti hijau. Lantaran tak sabar, seorang remaja di atas motor Kawasaki KLX mengarahkan tunggangannya ke arah trotoar.

Spesifikasi motor yang diciptakan untuk medan sulit memudahkan anak muda yang mengenakan *sneaker* dan *hoddie* itu melintas di trotoar.

Beberapa pengendara lain yang



Harian Jogja/Desi Suryanto

**Warga dan** wisatawan berjalan-jalan menikmati jalur pedestrian Jalan Malioboro, beberapa waktu lalu.

tak kuasa menahan kemacetan mengikuti di belakangnya. Trotoar di persimpangan jalan sebelah tenggara Stasiun Lempuyangan itu langsung dipenuhi berderet

sepeda motor dan baru kosong setelah lampu hijau menyala hingga beberapa detik.

● Lebih Lengkap Halaman 8

### Repotnya Jalan...

Pemandangan demikian jama' terlihat pada jam-jam tertentu, misalnya waktu berangkat dan pulang kerja, nyaris di semua persimpangan di Kota Jogja.

Pengendara sepeda motor sesekali mengambil alih trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki. Namun, tindak tanduk pemotor tak seberapa dibandingkan dengan pedagang kaki lima (PKL), musuh abadi pejalan kaki di Kota Jogja.

Orang saja sesekali berjalan menyusuri ke Jl. Aradung, Gondokusuman, sebelah barat Stadion Mandala Krida. Parkirkan kendaraan di ujung utaranya dan mulailah melangkahkan kaki menuju selatan. Anda sekalian tak akan bisa berlelekk-gelekk santai di trotoar. Anda mesti berjalan di aspal yang pada siang panasnya bisa membakar telapak kaki kelanjang. Berjalan di lajur khusus sepeda pun bakal meopokan karena bahu jalan itu sudah dianeksasi sepeda motor untuk parkir.

Di trotoar timur jalan, banyak PKL yang berjualan macam-macam panganan seperti soto, penyetan, empek-empek, nasi goreng, dan ayam rica-rica. PKL di sini tidak mau setengah-setengah. Hampir semua bagian trotoar yang lebarnya sekitar 170 sentimeter itu ditelan habis oleh tenda-tenda.

Tak semua penggal Jl. Andong menempati kedai temporer milik PKL. Masih ada ruang kosong yang justru bikin pedestrian mengayunkan tungkai lebih tinggi. Pejalan sesekali bisa melewati trotoar, namun harus turun ke aspal saat di depannya ada terpal yang dipanangkan pada tiang-tiang besi, kemudian naik lagi ke trotoar, dan begitu seterusnya hingga ujung kidul. Kadang, penghalang bukan cuma berbentuk lapak-lapak, tetapi hamparan tikar yang sudah diduduki banyak orang.

PKL sah-sah saja berjualan di trotoar. Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No.26/2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang menyebutkan penggunaan trotoar untuk berdagang merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Ada hak berarti pula ada kewajiban. Partu PKL adalah menjaga dan memelihara kebersihan, ketertarikan dan ketertiban, serta menghormati hak-hak pihak lain guna mewujudkan Kota Jogja yang berarti nyaman. Lapak PKL tak bisa dibangun sembarangan.

Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No.45/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.26/2002 memberi syarat cukup ketat. Lokasi usaha PKL adalah trotoar yang ukurannya 1,5 sampai tiga meter. PKL juga tak boleh menggunakan seluruh lebar trotoar. Pasal 1 Perwal No.62/2009 yang

merupakan perubahan dari Perwal No.45/2007 menegaskan fungsi utama trotoar adalah untuk berjalan kaki sehingga PKL mau tak mau harus menyediakan akses bagi pedestrian.

#### Tak Dihukum

Agus, pegawai di kedai PKL yang tendanya memenuhi trotoar Jl. Andong mathum apa yang ia lakukan tak benar. Agus adalah pedagang resmi. Ia punya izin yang dipasang baik baik di gerobak empek-empeknnya. "Kalau pas nyuri izin memang disuruh untuk menyisakan trotoar untuk pejalan kaki," katanya saat ditemui Sabtu (30/9).

Agus mengungkapkan, Pemerintah Kecamatan Umbulharjo yang menjadi pemberi izin memerintahkan dirinya untuk menyisakan tempat sebesar kurang lebih 70 sentimeter. Dulu ia mengikuti aturan itu. Tetapi enam bulan lalu, ketika tenda lama warnungnya rusak, bosnya menyuruh untuk mengganti tenda yang lapuk dengan ukuran yang lebih lebar. Wallhasil sekarang tak ada bagian trotoar yang tersisa bagi pejalan kaki.

Walaupun melanggar, Agus tidak pernah kena razia karena mencaplok trotoar. Sejak berjualan dari 2004, ia dua kali terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja sebanyak dua kali. Semuanya karena surat izin yang sudah kedaluwarsa.

Lain Agnis, lain lagi Tupin Prasetyo. Pria asal Kulonprogo yang sudah 13 tahun berjualan soto ayam di Jl. Andong ini dulu juga menyisakan beberapa jengkal trotoar bagi pejalan kaki. Namun, ketika PKL yang baru datang belakangan tidak ada yang mengindahkan peraturan tersebut, Tupin ikut-ikutan. "Kalau ngikutin aturan tapi yang lain didiamkan, jelas akan muncul kecemburuan," kata Tupin. Berbekal keyakinan itulah ia berani melebarkan lapak. Tupin baru akan memotong tendanya kalau pedagang yang lain juga melakukan hal yang sama. Pokoknya duduk sama rendah berdiri sama tinggi.

Selain trotoar di area sekitar Stadion Mandala Krida itu, trotoar lain yang dijajah oleh para PKL adalah sebagian trotoar di Jl. Cik Di Tiro. PKL mass ini mengelompok di bagian utara, dekat dengan Bundaran Universitas Gadjah Mada dan berada di sebelah Rumah Sakit Panti Rapih.

Patnadi, pria asal Gunungkidul yang pada hari itu menjadi pedestrian di area ini merasa sangat repot karena beberapa trotoar sudah diblok tenda PKL. "Kalau jalan di aspal kan bahaya. Bisa diserempet kendaraan," kata dia. Trotoar di sisi utara Jl. Cik Di

Tiro sangat tidak bersahabat untuk pedestrian. Tenda-tenda berhimpit-himpitan. Pejalan kaki harus berada di bahu jalan beraspal, bersaing dengan kendaraan yang melaju. PKL juga kurang tertib karena ada yang tak membongkar lapaknya.

Padahal, Pasal 11 Perwal Jogja No.62/2009 menyebutkan salah satu syarat untuk mendapatkan izin adalah dengan menyerahkan surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar peralatan bila sudah tak digunakan.

Suwarto, pedagang yang tak mengindahkan aturan ini, punya lapak permanen nan kokoh. Barangnya banyak. Tak ada bedanya dengan warung kelontong yang berjualan di gang-gang perkampungan. Bahkan di dalamnya ada tempat tidur.

Suwarto mengaku sering mengikuti sidang tindak pidana ringan karena tidak membongkar tempatnya berjualan. Namun, dia tak kapok.

#### Sulit Diterbitkan

PKL yang memakan hak pejalan kaki adalah problem yang belum bisa dibersikan Pemerintah kota Jogja. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Jogja, Budi Santosa mengatakan PKL yang memasang tenda memenuhi trotoar jelas melanggar ketentuan. "Satpol PP tugasnya adalah menegakkan aturan. Kecamatan yang memberikan pembinaan. Ketika kecamatan sudah meminta operasi, baru kami bergerak," kata dia.

Kecamatan sebenarnya juga tidak diam saja. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Kecamatan Gondokusuman, FX Prasanto Hadi mengatakan PKL di Jalan Cik Di Tiro, saat ini dalam pengawasan karena banyak yang melanggar. Namun, pihaknya tak bisa ujung-ujung bertindak. Pemerintah Kota Jogja saat ini masih memberlakukan moratorium perpajakan dan pemberian izin bagi PKL. "Kami masih menunggu arahan Pak Wali Kota dahulu. Saat ini masih mengambang. Kalau sudah ada arahan baru kami bisa mengambil keputusan," kata dia.

Elanto Wijoyo, aktivis Warga Berdaya, kelompok yang fokus pada hak-hak pejalan kaki, menyebut Pemerintah Kota Jogja belum bisa menegakkan Perda No.26/2002 secara menyeluruh. Menurut dia, masih sering ada lempar tanggung jawab antara Satpol PP dan kecamatan. Dia meminta Pemerintah Kota Jogja bersikap tegas untuk menertibkan beragam ketidaktertiban pedagang. (Sawitraharianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005